

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Administrasi dan Administrasi Publik

Ilmu administrasi adalah salah satu spesialisasi ilmu sosial yang mempelajari tentang kerja sama manusia dalam mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan atau pekerjaan tulis menulis, sedangkan pengertian administrasi secara luas menurut Zulkifli (2010; 17) mengatakan bahwa keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi yang mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap tujuan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan. Setelah mengetahui beberapa definisi administrasi maka ciri-ciri administrasi tersebut dapat digolongkan. Adanya kelompok manusia terdiri dari dua orang atau lebih :

- a. Adanya kerjasama
- b. Adanya kegiatan
- c. Adanya bimbingan
- d. Adanya tujuan

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan atau pekerjaan tulis menulis, sedangkan pengertian administrasi secara luas menurut Zulkifli (2010;17) mengatakan bahwa keseluruhan proses aktivitas

kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi yang mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Organisasi dan Organisasi Publik

Sedangkan organisasi menurut Siagian (2010;9) sebagai wadah yang relatif statis, antara lain mempunyai makna sebagai berikut ;

1. Organisasi dipandang merupakan pengembangan jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang.
2. Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarkis kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab.
3. Organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Manulang (2010; 23) setiap organisasi menggunakan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan memiliki suatu administrasi yang mengacu kepada jasa sebagai produk lembaga sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh suatu atau sekelompok organisasi tertentu.

3. Manajemen dan Manajemen Publik

Manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Manulang (2008;94) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Hasibun. 2005;1).

Manajemen (*management*) adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut (Simammora.2001;3). Sedangkan menurut Terry (dalam Nawawi. 2005;39) menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.

Pemerintahan hari ini mesti mampu tampil sebagai agen penyimbangan equilibrium model. Dalam konteks ini juga system pemerintahan lokal berfungsi sebagai publik *relations agent* yang efektif, menampilkan komunikasi pemerintahan yang harmonis diantara berbagai *stakeholder* (Yussa Tarmizi.2011;110).

Manajemen publik juga diartikan:

New Public Management adalah *An interdisciplinary study of the genetic aspects of administration a blend of the planning, organizing, and controlling functions of management with the management of human, financial, physical, information and political resource* (Garson.1983;275).

Secara mendasar dapat diartikan, manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

4. Teori dan Konsep Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa pengertian berikut ini:

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seseorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau yang di maksud, dan hal itulah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Ames Anderson, (dalam Agustino. 2007;166).

Kebijakan publik menurut Richard Rose adalah sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konseksus bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan (dalam Agustino.2006;41).

Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho.2006;53) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu”, (*a projectod program of goals, values and practies*). Selanjutnya David Easton (dalam Nugroho.2006;53)

menyebutkan kebijakan publik “sebagai aktivitas pemerintah”, (*the impact government*).

Dengan demikian kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan.

Nugroho (2006;54) mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Harold Laswell (dalam Nugroho.2006;3-4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktek tertentu.

Thomas Dye menyebutkan bahwa “*public policy is whatever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah

mencakup “apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya (dalam Agustino.2006;41).

Dari beberapa definisi di atas, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Publik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkalis diharapkan Peraturan Daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan implementasinya dari sisi ekonomi dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat

5. Implementasi Kebijakan Publik.

Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dapat dicermati dari beberapa definisi berikut:

Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut (Agustino.2006;153).

Bardach (dalam Agustino.2006;54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang.

Metter dan Horn menyebutkan implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (dalam Agustino.2006;139)

Peter Ferdinand Drucker (1954) pada bukunya yang berjudul *the practice of management* menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, seorang pengambil kebijakan harus mempertimbangkan dan memperhatikan kegiatan/pekerjaan :

1. Kedudukan / Posisi dipasar(*market standing*)
2. Inovasi (*innovation*)
3. Produktivitas (*productivity*)
4. Sumber daya fisik dan financial (*physical and financial resources*)
5. Kemampuan untuk menghasilkan (*profitability*)
6. Kinerja dan perkembangan manajer (*manager performance and devoloment*)
7. Kinerja dan sikap pekerja (*worker performance and attitude*)
8. Tanggung jawab publik / *social* (*public or social responsibility* (dalam Agustino.2006;140).

Semua kegiatan atau pekerjaan di atas dilakukan diarahkan menuju tujuan perusahaan, para pembuat kebijakan (manajer atau pimpinan) harus fokus untuk mensukseskan tujuan perusahaan atau instansi, jika tidak terpenuhi maka mereka salah arah, telah menya-nyiakan tenaga, bukan sebuah *team work* yang dihasilkan tetap malahan gesekan-gesekan, rasa frustrasi dan konflik untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas.

Tanggung Jawab Sosial bisa muncul dari pengaruh sosial dan persoalan masyarakat itu sendiri.kedua hal ini mesti menjadi perhatian manajemen karena berbeda didalam masyarakat dan komunitas. Tetapi dilain pihak kedua bidang ini berbeda pertama, berhubungan dengan pengaruh apa yang dilakukan lembaga kepada masyarakat dan kedua,berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan lembaga untuk masyarakat (Drucker.1984;364)

Drucker (1984;363) menggunakan resep dengan istilah *management by objectives* (MBO) yaitu penekanan pada lima elemen penting yaitu :

- a. *Planning*
- b. *Organization*
- c. *Command*
- d. *Coordination*
- e. *Control*

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Drucker 1984-364).

Implementasi kebijakan menjadi sebuah tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakannya, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Udoji yang mengatakan bahwa; “Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Drucker 1984-364).

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”. Implementasi kebijakan dapat bekerja secara efektif jika mendapat dukungan staff yang memadai disatu sisi, sedangkan disisi lain menunjukkan bahwa kebijakan tidak efektif jika staf atau personel tidak mendukung terhadap pekerjaan tersebut (Drucker 1984-364).

Faktor-faktor implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwar III (dalam Agustino.2006;157) secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan. Edwar III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu: transmisi (*transmisi*), penjelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Substansi kebijakan harus dipahami oleh pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Apabila dalam menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa bertentangan.

Mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu :

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi pula.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan (dalam agustino. 2006;157-158).

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya (*resource*) pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika implementasi kebijakan, maka implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk membawa implementasi itu ketataran praktis. Banyak implementor mencoba untuk menghubungkan hal-hal

penting karena implementor mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Tanpa sumber daya, apa yang tertulis diatas kertas tidak akan sama dengan *policy* yang dijalankan. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staff atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat mengagalkan implementasi kebijakan publik.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi, kavel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (dalam Agustino. 2006;158-159).

3. Sikap (*Disposition*)

Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau

adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terhadap kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kedua yang serius (dalam Winarno. 2005;142- 143).

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

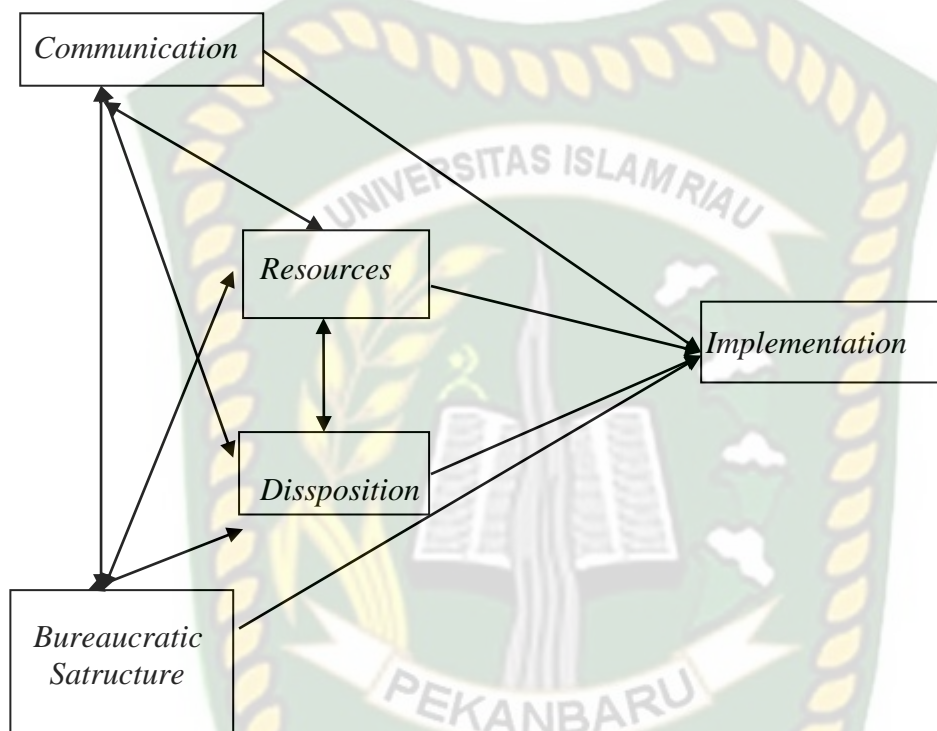
Efektivitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwar III (dalam Awang.2010;43) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures (SOP)* dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, konstitusi Negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi kebijakan publik.

Rifly dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi di Amerika Serikat yaitu :

1. Biroksi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan keperluan publik (*public efair*)
2. Biroksi merupakan institusi yang doninan dalam inplementasi kebijakan public yang mempunyai kepentingan yang berbeda beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar (dalam Winarno. 2005;149-160).

Secara skematis faktor-faktor implementasi menurut Edwar III dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.1. Faktor-Faktor Implementasi



Sumber : George III Edward (1980)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwar III sebagaimana digambarkan di atas dapat menentukan keberhasilan pelaksana atau implementasi kebijakan, tetapi sebaliknya akan menuai kegagalan jika faktor-faktor tersebut diabaikan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Agar suatu Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait. Menurut Ndraha (2003;290) menyebutkan bahwa koordinasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak

yang satu tidak mengganggu proses pihak yang lain, sementara di sisi lain yang satu langsung mendukung pihak yang lain.

Adapun tujuan koordinasi menurut Ndraha (2003:295) adalah:

1. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penterasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

6. Implementasi Penerapan TJSP

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012
 - a. Pasal (1) Program Kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
 - b. Program Bina Lingkungan adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 142 Tahun 2015, tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau.
 - a. (Pasal 1 bab 1 ketentuan umum), Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Riau.
 - b. Gubernur adalah Gubernur Riau.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
 - d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Corporate social Responsibility* / program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
 - e. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
 - f. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi yang selanjutnya disingkat forum TJSP adalah forum yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan TJSP di Provinsi Riau
 - g. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi, penyelenggaraan.
 - h. Sekretariat Forum tim yang melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan koordinasi perencanaan kegiatan TJSP.
4. Kebijakan Perusahaan *PT Adei Plantation and Industry* dengan 8 Prinsip RSPO (*roundtable on sustainable palm oil*)
 - a. Komitmen terhadap transparansi
 - b. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
 - c. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
 - d. Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik
 - e. Tanggung Jawab Lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
 - f. Tanggung Jawab kepada pekerja individu-individu dan komunitas dan pabrik
 - g. Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab

- h. Komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas.

b. Struktural Organisasi Pelaksanaan TJSP

Struktural Birokrasi dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sebagai unsur pelaksana dari Kebijakan TJSP yang terdiri dari Bappeda Provinsi, DPRD, Bappeda Kabupaten, Camat, Kepala Desa, dan pihak perusahaan PT *Adei Plantation And Industry* sebagaimana yang dijelaskan dalam struktur birokrasi, unsur-unsur pelaksanaannya antara lain: Pemerintah Provinsi Riau Gubernur (Bappeda, dan DPRD), berperan dalam pembuatan dan penerapan serta pengawasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Bupati, Bappeda, Kecamatan, dan desa serta Perusahaan), mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan TJSP dalam uraian di bawah ini.

Tabel II.1 Susunan Personil Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP)

No	Nama Jabatan Kedinasan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Ketua
2	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Ketua 1
3	Kepala Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Sekretaris
I	Bidang pendataan dan Dokumentasi Sekretariat TJSP		
4	Syavitri Handayani	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Anggota
II	Bidang Kerja TJSP Pendidikan, kesehatan, Olahraga dan Seni Budaya, Sosial dan Keagamaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat		
6	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	Badan Perencanaan dan Pembangunan	Koordinator

		Daerah Provinsi Riau	
7	Kepala sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Anggota
III	Bidang Kerja TJSP Usaha Ekonomi Kerakyatan		
8	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Koordinator
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Anggota
IV	Bidang Kerja TJSP Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup		
10	Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Koordinator
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan fisik dan Prasarana wilayah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Anggota

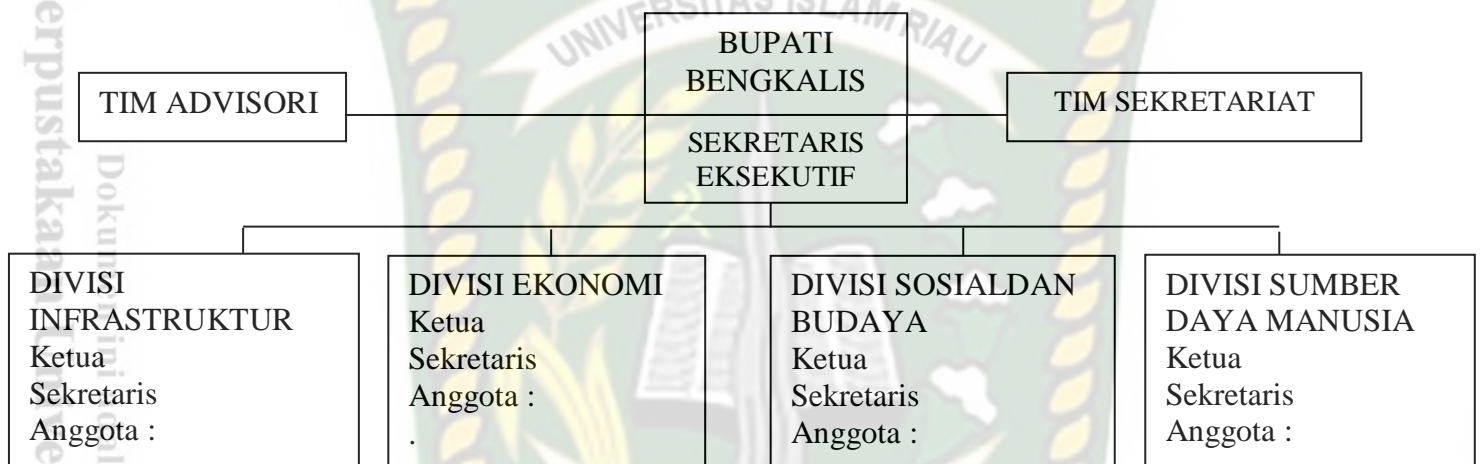
Sumber: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016

Sekretaris forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi perencanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
2. Memfasilitasi dan membantu forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
3. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Riau dengan Dewan Pelaksana Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

4. Menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan TJSP dalam rangka fasilitasi pengembangan kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) kepada Gubernur Riau selaku Ketua Dewan pelaksana.

Gambar II.2 Bagan Organisasi Forum Koordinasi Implementasi Program TJSP Kabupaten Bengkalis.



Sumber. Sk Bupati Bengkalis No. 94/KPTS/11/2014

Implementasi perda TJSP Pemerintah Daerah, dapat memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSP sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Secara Sruktur TJSP berada di bawah bidang kerja sama penelitian Bappeda Provinsi Riau kemudian terjadi pemecahan struktur OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bidang kerja sama tidak ada lagi di Bappeda sehingga Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerja sama pindah ke Biro Kerja Sama dan Humas, sehingga Biro Kerja sama menindak lanjuti implementasi perda TJSP.

Dalam Keputusan Bupati Bengkalis No 94/KPTS/11/2014 yang dimuat dalam Diktum satu membentuk Forum Koordinasi Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Bengkalis:

1. Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, merupakan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, perwakilan masyarakat dan organisasi lainnya yang relevan di Kabupaten Bengkalis dengan Periode kepengurusan selama 3 Tahun
2. Dalam melaksanakan tugasnya, forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
3. Untuk kelancaran tugasnya Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu secara administrasi berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai pembagian kerja Pengurus dan Bagan Organisasi.
5. Mengenai keanggotaan, pedoman umum organisasi dan kepengurusan (PUOK) serta kebijakan lain menyangkut kerja forum akan disusun oleh forum.
6. Biaya yang akan ditimbulkan akibat dikeluarnya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
7. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bengkalis No 230/KPTS/IV/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Berikut laporan kegiatan PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY dalam pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan:

Tabel II.2 Laporan Kegiatan PT Adei Plantation and Industry

No	Kegiatan PT Adei (TJSP)	Penyerahan bantuan	Tahun	Anggaran (Rp)
1.	Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Qurban (kambing dua ekor/desa)	2016	36.800.000
2.	Infrastruktur dan Bangunan	1. Membeli alat berat untuk perbaiki jalan. 2. Pembuatan kolam ikan untuk kelompok tani.	2016	11.000.000
3.	Pendidikan	1. Penyerahan bantuan perlengkapan alat sekolah meja belajar dan kursi 10 set di SMPN 5 Pinggir 2. Penempatan magang/prakerin dasi sekolah SMK sederajat di Kecamatan Pinggir.	2016	5.000.000
4.	Olahraga dan Rekreasi	Penyerahan bantuan dana penyewaan transportasi/ bus kegiatan turnamen bola Kecamatan Pinggir	2016	2.500.000
5	Sumbangan dan Keagamaan	Penyerahan bantuan Hari Raya Idul Fitri	2016	78.769.500
6	Perayaan hari besar nasional	1. Penyerahan bantuan CSR acara turnamen <i>volley</i> 2. Penyerahan bantuan HUT RI kepanitia perayaan HUT RI.	2016	2.000.000
7	Kearifan lokal dan penghijauan	Bantuan bibit tanam pelindung	2016	1000.000

Sumber: PT Adei Plantation and Industry th 2016.

Dari Tabel diatas Laporan Kegiatan CSR di Perusahaan *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* pada tahun 2016 yang bisa di data kan karna dari hasil penelitian data yang pada tahun 2016 yang bisa di datakan penulis sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat

penyerahan bantuan qurban (kambing dua ekor) dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1432 H untuk Sembilan desa (desa Muara basung,Tengganau,Balai Pungut, Kuala Penaso, Koto Pait, Semunai,Balai Raja dan Titian Antui) Kecamatan Pinggir Desa senilai Rp.36.800.000 (Tiga puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Infrastruktur dan Bangunan

Kegiatan CSR Menggunakan alat berat selama 3 hari memperbaiki jalan masyarakat desa kuala penaso dusun Lubuk tabuh. Pembuatan Kolam ikan untuk kelompok tani manuah desa Muara Basung Kecamatan Pinggir senilai Rp11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah).

3. Pendidikan

Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah berupa meja belajar dari kursi sebanyak 10 set di SMPN 5 Pinggir. Penempatan magang / prakerin dasi sekolah SMK sederajat di Kecamatan Pinggir Rp.5000.000 (lima juta ribu rupiah).

4. Olahraga dan Rekreasi

Penyerahan Bantuan dana Penyewaan transportasi / Bus Kegiatan Turnamen Persehabatan group Bola Desa Beringin dan Kotopait Kecamatan Pinggir.

5. Sumbangan Keagamaan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Penyerahan Bantuan Perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk Sembilan desa (desa Muara Basung, Tenganau, Balai Pungut, Kuala Penaso, Beringin, Koto Pait, Semunai, Balai Raja, dan Titian Antui). Berupa santunan anak yatim piatu 225 Orang sajadah panjang 1x 10 dan alquran dan sirup sejumlah 162 Kotak dengan nilai bantuan Rp 78.769.500.

6. Perayaan Hari Besar Nasional

Penyerahan Bantuan TJSP acara turnamen Volly tingkat Desa Muara Basung dusun Sialang Rimbun dalam perayaan HUT RI Desa Muara Basung bersama anggota DPRD Kab. Bengkalis Rp.1000.000. Dan Penyerahan bantuan HUT RI Kepanitiaan Perayaan HUT RI Desa Tenganu Rp 1000.000.

7. Kearifan Lokal dan Penghijauan

Bantuan bibit Tanaman Pelindung untuk karyawan dan masyarakat untuk ditanam di area perumahan, perkantoran, dan area konservasi sepadan sungai Rp.1000.000.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP)

Berdasarkan pada *Trinidad and Tobacco Bureau of Standards (TTBS)*, *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetyo dan Rudito. 2004;72).

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerjadan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara. 2004;49).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan (Kotler dan Nancy. 2005;4).

Forum mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (Wibisono.,2007;8).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Di sini perlu dibedakan antara program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik (“Paradigma Baru TJSP”, Oktober 2006).

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan *sustainable* akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono. 2007;66).

Philip Kotler dan Nancy Lee juga mengatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi di wilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis (Kotler & Nancy, 2005).

Melihat pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) di masa mendatang. Logikanya sederhana, jika Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diabaikan kemudian terjadi insiden. Maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu sendiri. Hal ini belum termasuk pada resiko non-finansial yang berupa memburuknya citra perusahaan di mata publiknya (Wibisono, 2007).

Berdasarkan Tanggung Jawab Sosial, bisnis merupakan organisasi global non profit yang menyediakan bisnis dengan informasi, perangkat, pelatihan, jasa penasihat yang bertujuan untuk mengintegrasikan TJSP ke dalam strategi dan bisnis mereka. TJSP memiliki beberapa keuntungan (Kotler dan Lee. 2005;10-11):

1. Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar
2. Mengeluarkan posisi merek
3. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan
4. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik, memotivasi dan memuaskan karyawan
5. Menurunkan biaya-biaya operasi
6. Meningkatkan daya tarik investor dan analisis keuangan.

Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Setelah itu, TJSP mengalami pengembangan konsep secara terus menerus, semula kegiatan TJSP berorientasi pada “filantropi”, maka saat ini telah dijadikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan “citra perusahaan” yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan beserta pentingnya pengembangan masyarakat terhadap penerapan TJSP.

Penerapan TJSP saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko menuju sustainability kegiatan usahanya. Substansi TJSP adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik lokal, nasional maupun global.

Secara singkat, TJSP mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas Mc Williams dan Siegel (dalam (Ardianto. 2011;35) juga meyakini bahwa :

TJSP is conventionally defined as the social involvement, responsiveness, and accountability of companies apart from their core profit activities and beyond their requirements of the law and what is otherwise required by government. The World Business Council for Sustainable Development (Business Action for Sustainable Development).

TJSP secara konkret didefinisikan sebagai keterlibatan sosial, responsivitas, dan akuntabilitas perusahaan selain dari kegiatan keuntungan mereka diluar tuntutan hukum dan apa yang dinyatakan oleh pemerintah. (aksi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan).

TJSP adalah *:The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*". Artinya, TJSP diungkapkan sebagai komitmen berkelanjutan dari pelaku bisnis atau perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi serta meningkatkan para pekerja, keluarga, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas (Solihin.2009;28).

Secara universal, dari kedua pemahaman tersebut mengungkapkan bahwa aktivitas TJSP pada umumnya mempunyai tujuan sebagai keterlibatan sosial pelaku bisnis atau stakeholder dalam mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan pada kualitas hidup pekerja atau masyarakat sebagai penunjang triple bottom line perusahaan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasa mampu mendongkrak citra perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam rentang waktu panjang.

8. Penerapan Program-Program TJSP.

Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. TJSP merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image.

Isu strategis dalam kaitan pembangunan berkelanjutan sineritas dan inklusif hal tersebut mengakibatkan pembangunan membawa perubahan ekonomi sosial, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan dan semakin komplik. Oleh karena itu pengelolaan perubahan akibat pembangunan perlu memperhatikan secara berkelanjutan, disadari tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah namun perlu didukung oleh beberapa pihak termasuk dari usaha (Swasta dan BUMN).

Adapun progam-program TJSP dalam peningkatan ekonomi di dalam masyarakat antara lain :

1. Kesejahteraan masyarakat
2. Infrastruktur di bangunan
3. Pendidikan
4. Olahraga dan Rekreasi
5. Sumbangan Keagamaan
6. Perayaan Hari Besar Nasional
7. Lain-Lain dan (kearifan dan penghijauan)

9. Implementasi TJSP

Tanggung Jawab Sosial bisa muncul dari pengaruh sosial dan perusahaan itu sendiri. Kedua hal ini mesti menjadi perhatian manajemen karena berada didalam Masyarakat dan Komunitas. Tetapi di lain pihak kedua bidang ini berbeda pertama, berhubungan dengan pengaruh apa yang dilakukan lembaga kepada masyarakat. Dan kedua, berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan lembaga masyarakat. Apabila atau suatu lembaga, kita diminta memikul Tanggung Jawab sosial atas salah satu masalah penyakit masyarakat dan

komunitas, manajemen perlu memikirkan tanggung jawab itu jika tidak maka berarti ia menyalahgunakan pengaruhnya dan tidak bertanggungjawab. (Drucker, 1948 :385). Konsep Kemitraan dan rekanan dari masing- masing *stakeholder*. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting (Rio De Janeiro Brazilia, 1992) diantaranya adalah :

1. Ketersediaan dana
2. Misi lingkungan
3. Tanggung jawab sosial
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah)
5. Mempunyai nilai keuntungan/ manfaat.

Peraturan yang jelas Tentang Penerapan TJSP mulai dari Undang-undang sampai Peraturan-peraturan dibawahnya. Di Provinsi Riau telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang TJSP dan sesuai Pasal 5 Perda tersebut berfungsi :

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial termasuk lingkungan perusahaan dalam suatu koordinasi
2. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam suatu koordinasi
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
5. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan: dan
6. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan member penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Paul A. Argenty dalam bukunya Komunikasi Korporat menyebutkan TJSP membentuk kehormatan sebuah organisasi bagi kepentingan masyarakat, ditunjukkan dengan mengambil rasa memiliki dari efek aktivitas terhadap konstituen kunci termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas

dan lingkungan, dalam semua bagian dari operasi mereka. Akuntabilitas sering meluas melebihi pelaksanaan dasar dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mencakup usaha-usaha sukarela dan proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga mereka begitu pulabagi komunitas lokal dan masyarakat luas (Argenty. 2010;123).

Sedangkan Kotler dan Lee (2005;3). Memaparkan:

TJSP commitment to improve community wellbeing through discretionary businesspractices and contribution of corporate resources (Tanggung Jawab sosial perusahaan adalah sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis discretionary dan kontribusi sumber daya perusahaan).

Bentuk program TJSP memiliki dua orientasi. Pertama: Internal, yakni TJSP yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas. Kedua :Eksternal, yakni TJSP yang mengarah pada tipe ideal yang berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang suai dengan keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya.

Menurut David Crowther (2010) mengungkapkan bahwa identifikasi kegiatan TJSP melalui 3 prinsip utama yakni :

1. Sustainability (Keberlanjutan)

Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang yang dikemudian haridapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang dapat kita ambildi masa depan. Jika sumber daya yang kita gunakan dimasa sekarang tidak lagitersedia, dimasa datang dimana sumber daya tersebut dikatakan terbatas dalamjumlah. Maka dari itu, pada saat tertentu sumber daya alternatif dibutuhkan untuk sekedar memenuhi fungsi dari sumber daya yang ada saat ini. Hal

ini berdampak baik bagi organisasi dimana mereka dapat mengendalikan biaya dengan menggunakan sumber daya atau bahan yang mereka sediakan sendiri dari pada mencarinya dari luar. Jadi, tujuan utamanya adalah melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang (dalam Teuku dan Imbuh.1997;67).

Adapun 7 strategi dalam isu-isu keberlanjutan adalah :

1. Pertumbuhan yang berkelanjutan
2. Merubah kualitas pertumbuhan
3. Pemenuhan kebutuhan yang esensi seperti pekerjaan, makanan, energi, air dan sanitasi
4. Pemeliharaan dan peningkatan basis sumber daya
5. Orientasi teknologi terus menerus dan mampu mengatur resiko
6. Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

2. *Accountability* (Pertanggung Jawaban)

Dalam sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar atau diartikan sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Konsep ini berlaku dengan mengkuatifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari tindakan yang diambil baik internal organisasi maupun external. Lebih kepada pelaporan terhadap *stakeholder* yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara aktifitas yang dilakukan terhadap *stakeholder* (Teuku dan Imbuh. 1997;67).

3. *Transparency* (Keterbukaan)

Merupakan sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa disembunyikan. *Transparency* merupakan prinsip yang berkaitan dengan kedua prinsip TJSP dan dapat dikatakan sama dengan *process*

pengenalan tanggung jawab terhadap efek yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar (*Stakeholder*) atau sama dengan *process transfer* kekuatan ke *stakeholder* atau *stakeholder* dengan sadar dapat menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan karena organisasi melakukan prinsip keterbukaan dalam setiap kegiatan yang berdampak TJSP tanpa inovasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* akan menghasilkan program “basa-basi”, sedangkan program TJSP yang efektif dan terdiferensiasi akan memunculkan sebuah inovasi. TJSP dapat diartikan sebagai sebuah komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan Tanggung jawab sosial sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas dimana mereka berada (Teuku dan Imbuh (1997).

Tanggung jawab sosial diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan lingkungan Ivan Sevic (Hasibuan,2001). Selain itu perusahaan harus berperan aktif dalam menunjang kesejahteraan masyarakat luas (Westondan Brigham (1990).

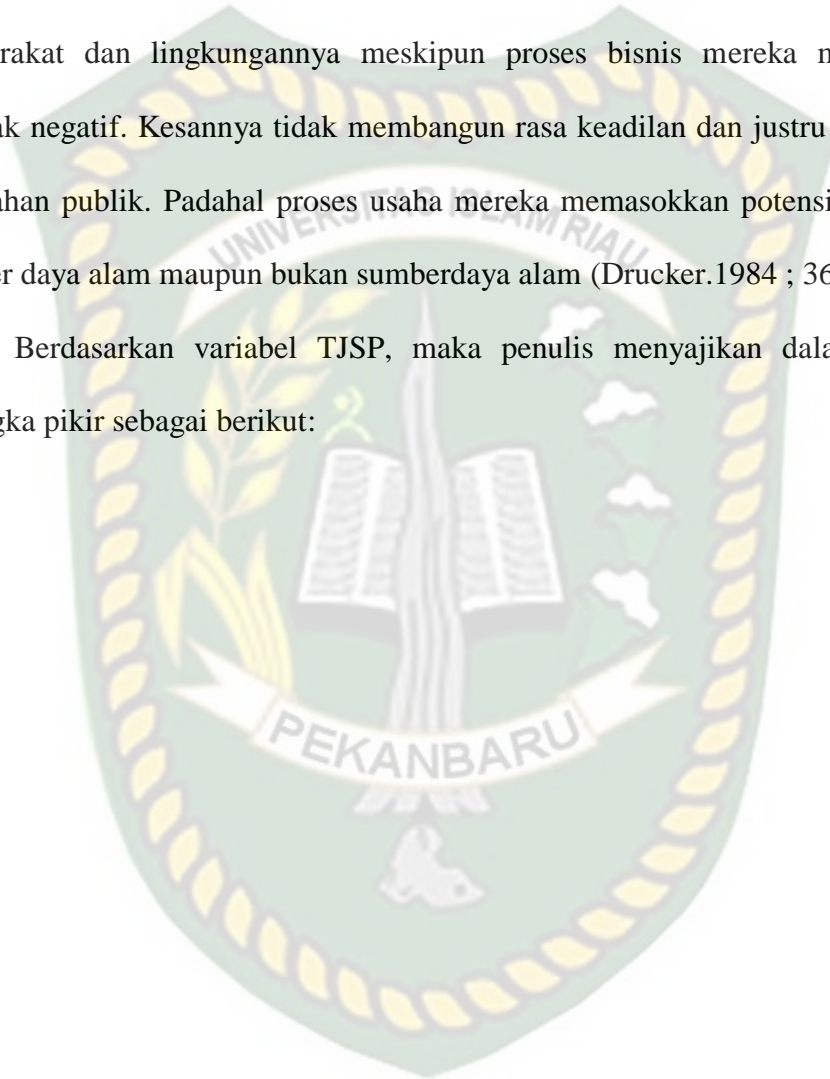
B. Kerangka Pikiran

Dari beberapa teori yang sudah dijelaskan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini diuraikan alur pikir yang menduduki permasalahan dalam penelitian ini. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan

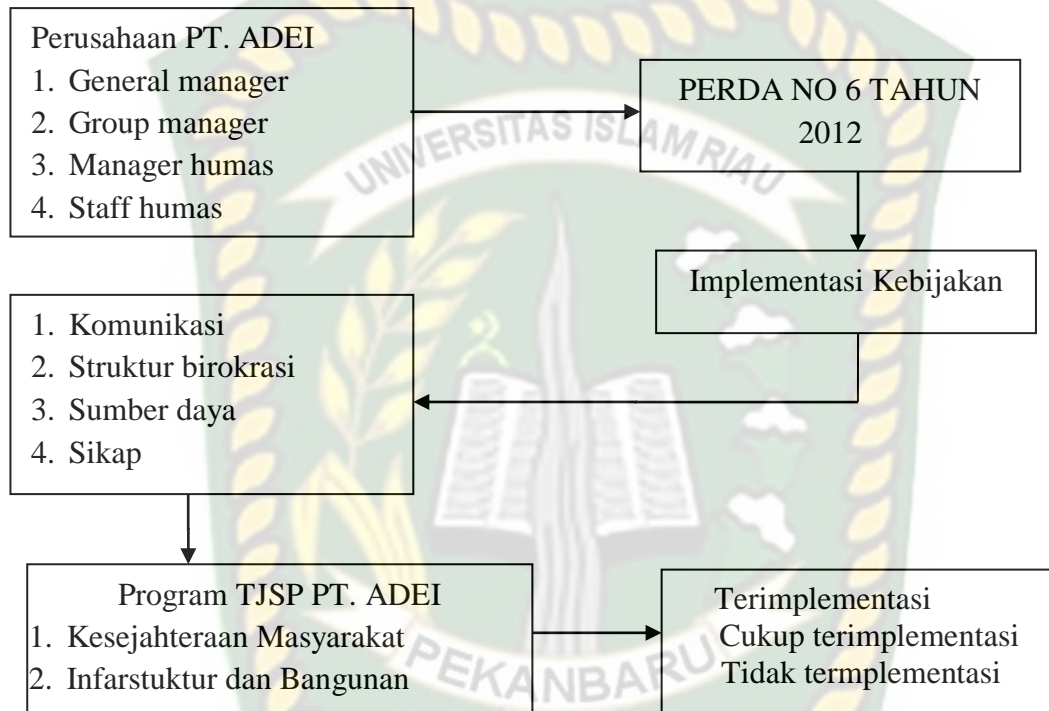
dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, et.al. 2004;72).

Tanggung Jawab Sosial adalah sikap acuh ketidak pedulian usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya meskipun proses bisnis mereka memberikan dampak negatif. Kesannya tidak membangun rasa keadilan dan justru menambah kesusahan publik. Padahal proses usaha mereka memasokkan potensi lokal baik sumber daya alam maupun bukan sumberdaya alam (Drucker.1984 ; 362).

Berdasarkan variabel TJSP, maka penulis menyajikan dalam gambar kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar II.3 Kerangka Pikiran Faktor-faktor mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial lingkungan dan perusahaan pada PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

C. Hipotesis

Diduga pelaksanaan TJSP di PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 belum terlaksana dengan baik.

D. Konsep Operasional

Untuk memberikan kesatuan pendapat penulis mengemukakan konsep operasional yang merupakan konsep yang dipakai dalam proses penelitian yang di maksud untuk menerjemahkan konsep teoritis yang ada sehingga tercipta suatu pengertian dari penelitian ini.

Oleh karena itu penulis akan menjelaskan pemakaian konsep-konsep penelitian untuk menghindari kekeliruan dalam pemakaian konsep yang meliputi :

1. Kebijakan publik adalah sebagai keputusan (*decision*) tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokusrasinya terhadap kebutuhan publik, kebijaksanaan bukan saja mengumpulkan informasi, tetapi juga memindahkan informasi sebagai argument bernalar mengenai kebijaksanaan publik.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali kota).
3. Perda TJSP Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 1 selanjutnya di singkat TJSP adalah tanggung jawab melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya.

4. Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Implementasi Peraturan Daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
6. Unsur Pelaksanaan Kebijakan yaitu kegiatan yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengimplementasikan TJSP oleh PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY*.
7. Birokrasi adalah unsur pelaksana dari kebijakan TJSP yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Humas, DPRD, Camat, dan Kepala Desa.
8. Struktur organisasi adalah unsur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan TJSP di Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA), Camat, dan Kepala Desa.
9. Disposisi adalah sikap pelaksana. Dalam Implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan Implementor Kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.
10. Sasaran Kebijakan bertujuan pada unsur masyarakat yang berada di Lingkungan di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten

Bengkalis didalam pelaksanaan TJSP di *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY*.

11. Kelompok sasaran TJSP adalah sekelompok orang atau desa yang terdiri dari 2 Kelurahan, 7 desa antara lain : Kelurahan Titian Antui, Kelurahan Balai Raja, Desa Semunai, Muara Basung, Tenggana, Balai Punggut, Kualo Penaso, Koto Pait Beringin, Beringin. Yang menerima barang atau Jasa dalam pelaksanaan kebijakan TJSP.
12. Karakteristik kelompok sasaran adalah setiap sekelompok yang menerima bantuan sesuai dengan karakteria yang ada seperti kurangnya bantuan rumah layak uni, dan infrastrukturnya belum cukup baik dan lain-lain.
13. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan TJSP masih banyak desa yang tertinggal dan jumlah masyarakat masih banyak yang berpenghasilan rendah, seperti banyaknya pengangguran dan tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah.

E. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variable dengan 4 indikator, maka dilakukan operasional variable yang tertuang pada II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4 Operasional Variabel Penelitian

No	Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
	1	2	3	4	5
1	Implementasi adalah suatu proses yang dinamis di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi Implementasi kebijakan Faktor – faktor tersebut yaitu: faktor komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi(<i>George c Edwards, implementing public, 1980.</i>)	Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada <i>PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY</i> di kecamatan Pinggir dan Talang Muandau	Komunikasi Sumber Daya Sikap Struktur Birokrasi	a. Hubungan atasan dengan bawahan dalam pelaksanaan kebijakan b. Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan Memberikan informasi kepada masyarakat. a. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan b. Kebijakan memberikan ke -wenangan kepada orang yang ahli dalam pelaksanaan kebijakan. a. Melakukan pembagian tugas yang jelas Antar pembuat dan pelaksana kebijakan terjalin hubungan yang saling mendukung dengan Masyarakat b. Menunjukkan sikap yang positif sebagai implementor adanya Partisipasi masyarakat dengan cara mengawasi. a. Merumuskan kebijakan teknis dan pelayanan umum b. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan implementasi kebijakan	a. Terimplementasi b. Cukup Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi a. Terimplementasi b. Cukup Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi a. Terimplementasi b. Cukup Teimplementasi c. Tidak Terimplementasi a. Terimplementasi b. Cukup Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi

Sumber : *George c Edwards, implementing public, 1980*

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran ini menggunakan skala *Likert* yang merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik) seperti sikap, pendapat dan persepsi sosial seseorang atau kelompok orang (Sugiono.2014: 132).

Pengukuran terhadap indikator variabel diklafikasikan menjadi 3 bagian kategori penelitian, yaitu Implementasi, Cukup Terimplementasi, Tidak Terimplementasi. Berdasarkan Nilai Persentase yang diterapkan untuk respondennya sebanyak 22 orang, dengan persentase Terimplementasi 100%, cukup terimplementasi 66%, tidak terimplementasi 33%. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dinyatakan :

Terimplementasi : Jika Semua indikator berada pada kategori baik pada persentase 67% - 100%.

Cukup Terimplementasi : indikator berada pada kategori cukup dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden pada persentase 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila satu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang dilaksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban responden dibawah $\leq 33\%$.

Sub variabel Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis PT *Adei Plantation and Industry* di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dengan indikator :

1. Komunikasi : Proses komunikasi yang terjadi atau dilakukan didalam pelaksana kebijakan, antara sesama Pelaksana pelaksana dengan perusahaan dan Perusahaan.

Terimplementasi : Jika Semua indikator berada pada kategori baik Pada persentase 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Indikator berada pada kategori cukup dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden pada persentase 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila satu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang dilaksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban responden dibawah ≤ 33

2. Sumber Daya : Aspek-aspek potensi sumber yang di perlukan untuk suatu kebijakan organisasi antara manusia,dan teknologi .

Terimplementasi : Jika Semua indikator berada pada kategori baik Pada persentase 67%- 100%.

Cukup Terimplementasi : Indikator berada pada kategori cukup dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden pada persentase 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila satu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang dilaksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban responden dibawah $\leq 33\%$.

3. Disposisi : Sikap pelaksanaan kebijakan dalam sebuah institusi untuk mencapai suatu tujuan kebijakan tertentu.
- Terimplementasi : Jika Semua indikator berada pada kategori baik pada persentase 67% - 100%.
- Cukup Terimplementasi : Indikator berada pada kategori cukup dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden pada persentase 34% - 66%
- Tidak Terimplementasi : Apabila satu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang dilaksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban responden dibawah $\leq 33\%$
4. Struktur Birokrasi : Organisasi yang memiliki ciri dan cara kerja untuk mengarah, tetapi harus Mengikuti tata prosedur dan tanggung jawab
- Teimplementasi : Jika Semua indikator berada pada kategori baik pada persentase 67% - 100%.
- Cukup Terimplementasi : Indikator berada pada kategori cukup dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden pada persentase 34% - 66%
- Tidak Teimplementasi : Apabila satu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang dilaksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban responden dibawah $\leq 33\%$.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau